

Judul : Kementerian Haji diusulkan dibentuk
Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Kementerian Haji Diusulkan Dibentuk

Salah satu poin revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang diusulkan pemerintah adalah mengubah status BP Haji menjadi kementerian.

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang bulan ke-11 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pemerintah mengusulkan pembentukan kementerian haji. Usulan itu disampaikan melalui salah satu poin revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Kendati dinilai bisa membuat kerja penyelenggara lebih fokus dan efektif, pembentukan kementerian baru harus tetap disertai pembangunan sistem kerja yang transparan dan akuntabel.

Usulan pembentukan kementerian haji dengan mengubah status Badan Penyelenggara Haji muncul dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Allah, dari DPR nanti," kata Irfan Yusuf, Rabu (20/8).

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak tak memungkiri usulan perubahan status BP Haji menjadi kementerian di dalam DIM RUU Haji. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut. Sebab, ia mengaku perumusan DIM bukan dipimpin BP Haji. "Leading-nya Kemenkum (Kementerian Hukum) dan Kemensehneg (Kementerian Sekretariat Negara)," kata Dahnil.

Kendati demikian, BP Haji berkomitmen menerima apa pun keputusan yang dibuat Presiden dan DPR melalui revisi UU Haji dan Umrah. "Kami mengikuti perintah Presiden dan UU yang dibuat DPR," ujar Dahnil.

Kompas telah berupaya

Rancangan Undang-Undang Haji yang diserahkan pemerintah kepada DPR, Senin (18/8/2025). DIM RUU Haji dibuat pemerintah karena revisi UU No 8/2019 merupakan usul inisiatif DPR. Meski DIM RUU Haji sudah diserahkan, pembahasan RUU belum dimulai karena pimpinan DPR masih mengatur jadwal dan penugasan pembahasan ke Komisi VIII DPR.

Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Irfan Yusuf tak menampik bahwa dalam DIM RUU Haji yang diserahkan pemerintah terdapat usulan mengubah status badan itu jadi kementerian. Namun, ia tidak menjelaskan pertimbangan di balik usulan itu. "Keputusan terakhir minggu depan insya

mengonfirmasi usulan pembentukan kementerian haji itu kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melalui pesan singkat daring. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya belum menjawabnya.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid, membenarkan bahwa pemerintah memasukkan poin perubahan status BP Haji menjadi kementerian dalam DIM RUU Haji. Pimpinan DPR menerima DIM pemerintah itu sejak awal pekan lalu. Namun, pembahasan di Komisi VIII DPR belum dimulai karena masih menunggu hasil rapat dan penugasan dari pimpinan

DPR.

Kendati demikian, kata Hidayat, Komisi VIII DPR sudah memulai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pihak. Pada Rabu, RDPU dilaksanakan dengan Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, dan Komunitas Lansia Indonesia.

Pembahasan RUU Haji dalam waktu cepat juga dibutuhkan mengingat BP Haji sudah harus mulai bekerja menyelenggarakan ibadah haji pada Agustus 2025. Pada bulan ini, beberapa hal terkait penyelenggaraan sudah harus dimulai, misalnya pendaftaran dan penyewaan hotel. "Jadi memang diperlukan segera hadirnya

produk hukum yang menaungi lembaga yang nanti akan menyelenggarakan haji setelah dipisah dari Kementerian Agama," kata Hidayat.

Tanggapan fraksi

Hidayat melanjutkan, Fraksi PKS sepakat dengan usulan pemerintah untuk membentuk kementerian haji. Menurut dia, status kementerian pada institusi penyelenggara ibadah haji sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan haji bisa lebih baik.

Jika menjadi kementerian, institusi itu bakal setara dengan Kementerian Haji di Arab Saudi dan bisa menyelesaikan beragam permasalahan yang muncul karena Arab Saudi menganut sistem penyelenggara ha-

rus setara. Selain itu, status sebagai kementerian juga akan membantu pengelolaan haji di daerah.

"Nanti setelah undang-undang (tentang haji) itu ketuk palu di DPR dan disepakati dengan pemerintah, semua yang terkait penyelenggaraan haji akan berubah dari Kementerian Agama ke lembaga baru nanti, apakah badan, lembaga, kementerian. Kalau PKS sih, mendukung kementerian," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir juga mengatakan, ada usulan pembentukan kementerian haji pada DIM RUU Haji yang dibuat pemerintah. Menurut dia, usulan itu dibuat untuk memfokuskan tugas Kementerian Agama sehingga

penyelenggaraan ibadah haji dibuatkan kementerian tersendiri. Fokus kerja itu penting untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang selalu muncul dari tahun ke tahun.

Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Eko Prasjo menilai pembentukan kementerian haji akan lebih efektif dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Hal itu bisa mengurangi urusan Kementerian Agama yang cukup kompleks. Namun, pembentukan kementerian baru harus diiringi pembangunan sistem yang akuntabel dan transparan. Sebab, dana haji jumlahnya besar. Kementerian yang dibentuk harus bisa menjamin efektivitas dan akuntabilitas kerja. (NIA/INA/RTG)